

KPPS, Serdadu Demokrasi



Tim Humas Unimal melakukan patroli pada saat pemungutan suara, 14 Februari 2024. Foto : Bustami

Teuku Kemal Fasya

Sejak akhir Januari, media sosial, terutama *Tiktok* memunculkan banyak postingan terkait gembiranya terpilih sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Demikian pula ada *Tiktoker* yang sedih karena tidak terpilih menjadi anggota KPPS. Akhirnya rencana menikah, beli rumah baru, resepsi kelulusan, dan liburan ke luar negeri menjadi kandas.

Tentu saja itu hanya meme atau pernyataan karikatural. KPPS adalah instrumen terkecil dari penyelenggara Pemilu yang melakukan tugas utama penghitungan pada hari H (14 Februari 2024). Mereka pun hanya dibayar sekali untuk rentang kerja sebulan. Di luar honor, hanya ada *per diem* bimbingan teknis dan pelantikan. Untuk honor pun kemungkinan dibagikan paling cepat 25 Februari 2024.

Anggota KPPS dilantik serentak pada 25 Januari 2024. Jumlah KPPS yang terpilih sebanyak 5.741.127 orang dan tersebar di 820.161 TPS di seluruh Indonesia itu adalah benteng suara rakyat.

Serdadu demokrasi

Berapa gaji KPPS sesungguhnya? Jika melihat gajinya tentu orang akan tidak menyangka begitu banyak orang yang berharap mendapatkan pekerjaan ini, terutama yang telah berumur 17 – 54 tahun. Sebagaimana dijelaskan di situs KPU dan didiseminasi di banyak media, besaran honor ketua KPPS hanya Rp1,2 juta dan anggota mendapatkan lebih sedikit dari itu (Rp1,1 juta). Kecil sekali, bahkan untuk beli cincin tunangan pun tidak cukup. Bandingkan gaji ketua Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Rp2,5 juta dan ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rp1,5 juta dengan masa kerja 15 bulan.

Untungnya, gaji KPPS melonjak lebih 100 persen dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2019 ketua KPPS mendapatkan upah Rp550 ribu dan anggota Rp500 ribu. Penulis sendiri pada Pemilu 2019 menjadi ketua KPPS Luar Negeri (KPPS-LN) di Kuala Lumpur dengan bayaran hampir Rp7 juta yang ditransfer dua bulan setelah Pemilu. Tentu itu sudah *in* dengan tiket pesawat dan penginapan yang harus ditanggung oleh peserta KPPS-LN yang datang dari Indonesia. Proses kerja pun tidak selesai dalam satu hari penghitungan. Pemungutan dilakukan pada 14 April 2019 dan penghitungan pada 17 April (H+3). Tahun ini ketua KPPS-LN mendapatkan honor Rp8,4 juta dan anggota Rp8 juta.

Namun jangan pernah remehkan peran KPPS. Mereka bisa disebut serdadu demokrasi elektoral. Mereka lah yang paling dimintai tanggung jawab atas kemurnian suara Pemilu. Beban kerjanya pun jauh berlipat karena harus maraton tanpa henti hingga 36 jam!

Pemilu 2019 menjadi pelajaran untuk pembatasan umur petugas KPPS. Refleksi pemilu terakhir yang memenangkan Jokowi saat itu, terdapat 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 sakit (*Kompas.com*, 22/1/2020). Tumbangannya petugas KPPS saat itu disebabkan beratnya beban kerja yang menguras tenaga, pikiran dan perasaan. Rata-rata petugas yang mengindap penyakit degeneratif (hipertensi, jantung, osteoporosis, diabetes) menjadi korban dominan. Maka, pada Pemilu kali ini ada pembatasan usia, bahwa yang lewat paruh baya hingga umur pensiun tidak dilibatkan lagi sebagai petugas KPPS.

Pemerintah mencoba merasionalkan gaji KPPS dengan beban kerja, meskipun juga tidak memadai. Problem utama kegiatan penghitungan adalah waktu yang tidak berjeda. Upaya memudah mekanisme penghitungan secara elektronik seperti dilakukan di negara maju belum jua disepakati. Ada kecurigaan *server* bisa diutak-atik oleh *hacker* atau rejim penguasa seperti pada pemilu di Amerika Serikat (2016), Rusia (2018), dan Turkiye (2023), dan menjadi sebab model tradisional ini masih dipilih di era serba digitalisasi seperti saat ini.

Kerja KPPS sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan KPU No. 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu akan mulai berkeringit sejak H-5 dengan mengumumkan lokasi TPS. Pada hari H, kegiatan dimulai dengan membuka rapat sejak pukul 07.00; membagi

Tanggal: 15 February 2024

Post by: [kemal](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Fisipol Unimal](#), [Politik](#),